TARGET HAPUSKAN KEMISKINAN EKSTREM

Pemkot Ajak Masyarakat Ikut Saling Bersinergi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengajak semua pihak terkait di masyarakat untuk saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Yogya. Terutama menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pemerintah pusat bisa nol pada 2024.

Menurut Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, dalam mengatasi kemiskinan pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Pihaknya pun telah menjaring masukan dari masyarakat melalui musrenbang tematik yang khusus membahas masalah kemiskinan. Dirinya berharap dalam musrenbang tematik tersebut dapat menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan guna identifikasi permasalahan dan menanggulangi kemiskinan.

"Kami harap ada masukan-masukan dan peran dari berbagai pihak untuk memecahkan persoalan kemiskinan di Kota Yogya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh saling bersinergi dan kolaborasi," jelas Sumadi, Minggu (26/3).

Di samping itu saat ini Kota Yogya menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 888 Tahun 2022. Kota Yogya juga termasuk dari 302 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi perluasan daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024. Hal itu sesuai keputusan Menko Bidang Pembangunan Nasional, dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022.

"Pemerintah pusat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ini hal yang serius dan jadi keputusan nasional dan Pemkot harus mendukung secara optimal. Jadi kita punya tugas yang cukup berat, tapi kita harus optimis bisa melaksanakan itu," tambahnya.

Rencana aksi pengentasan kemiskinan di Kota Yogya juga telah dipayungi Perwal 396/2022 sebagai percepatannya.

Di samping itu telah diterbitkan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota Yogya tahun 2023-2026. Terdapat enam bidang prioritas dalam dokumen tersebut yaitu konsumsi atau pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

"Pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkot juga dibatasi regulasi. Contoh dengan sumber APBD intervensi hanya dapat menyasar warga KTP Yogya. Warga domisili Yogya tapi tidak memiliki KTP Yogya tidak bisa. Padahal survei BPS menyasar juga warga miskin domisili di kota. Ini artinya perlu melibatkan stakeholder lain," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, mengatakan berdasarkan data BPS angka kemiskinan Kota Yogya tahun 2022 sebesar 6,62 persen. Angka tersebut turun 1,07 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,69 persen. Kemudian yang masuk dalam sasaran penanggulangan kemiskinan sebanyak 49.121 jiwa atau 17.452 kepala keluarga (KK) yang didalamnya termasuk sasaran kemiskinan ekstrem sebanyak 13.151 jiwa atau 3.674 KK. Sasaran itu mengacu pada data penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Kota Yogya tahun 2022 dan penyandingan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. **(Dhi)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

KOLABORASIKAN AKTIVITAS SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

Kelola Malioboro Tak Bisa Lepas Koordinasi

SURYANI SE MSI
Fraksi PDI Perjuangan

KR-Istimewa

YOGYA (KR) - Sebagai wajah Kota Yogya maupun DIY, Malioboro selalu menjadi perhatian publik. Lokasinya yang berada di garis sumbu filosofis menjadikan pengelolaannya tidak bisa lepas dari koordinasi. Baik antara Pemda DIY dan Pemkot Yogya selaku regulator, maupun para pelaku dan komunitas di kawasan tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya yang juga Ketua Komisi D Suryani SE MSI, mengungkapkan Pemda DIY memegang peranan paling dominan terhadap penataan sumbu filosofis. Apalagi saat ini tengah masuk fase penilaian oleh UNESCO atas usulan dijadikan warisan budaya dunia. Karena di dalamnya terdapat Malioboro yang selama ini dikelola Kota Yogya, maka koordinasi harus diperkuat. "Selalu harus ada koordinas untuk Malioboro ini. Kan di sana tidak hanya aktivitas budaya saja tetapi juga sosial dan ekonomi. Aspek tersebut dikolaborasikan dan menjadi kekuatan di Malioboro," tandasnya.

Oleh karena itu banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap Malioboro. Hal itu menjadikan Malioboro sebagai kawasan dengan daya saing tinggi. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di Malioboro, akan langsung menjadi perhatian publik. Jika hal itu tidak terkelola dengan baik, maka Kota Yogya secara keseluruhan akan terdampak.Dicontohkannya beberapa waktu lalu terdapat pemberitaan kurang tepat terkait komunitas angklung yang tidak diperbolehkan beraktivitas di pedestrian Malioboro. Publik bahkan sempat dibenturkan oleh narasi jika Yogya melarang angklung. Padahal larangan tersebut karena memanfaatkan jalur pedestrian yang seyogyanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tidak hanya angklung, hal itu juga berlaku bagi PKL, pengasong, otoped atau skuter listrik dan aktivitas lain. "Angklung atau kesenian lain yang digelar di persil tetap boleh. Tetapi yang di pedestrian ini memang perlu ditertibkan. Makanya kalau terus dibenturkan bisa menjadi kontroversi, padahal faktanya tidak demikian," tandas Suryani.

Di samping itu, imbuh Suryani, komunitas angklung yang dulu beraktivitas di Malioboro juga sedang menjalani kurasi. Harapannya ada beberapa sentuhan yang memunculkan ciri khas Yogya. Agar selanjutnya kelompok tersebut difasilitasi tampil di kawasan Malioboro tanpa mengganggu jalur pedestrian. Seperti di Teras Malioboro 1, Teras Malioboro 2 maupun Slasar Malioboro yang dikelola oleh PT KAI Daop 6 Yogya.

Dirinya mendorong, selain koordinasi yang terus dibangun secara intensif, pendekatan humanis juga menjadi unsur mutlak. Terutama ketika berhadapan dengan masyarakat atau kelompok yang diketahui tidak sesuai aturan di Malioboro. Koordinasi yang intensif akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atas sesuatu yang sedang atau akan ditertibkan. Sedangkan pendekatan humanis akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahami aturan yang diberlakukan. "Malioboro ini tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga sosial dan budayanya. Itu semua harus bisa dikolaborasikan. Sehingga koordinasi antar pemangku tidak boleh berhenti dan menegakkan aturan juga harus humanis atau persuasif," tandasnya. **(Dhi)-f**

KEDEPANKAN DIMENSI SPIRITUAL HINGGA LINGKUNGAN

Program Pembangunan Lansia Tangguh Segera Diwujudkan

YOGYA (KR) - Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kota Yogya cenderung meningkat. Program pembangunan lansia tangguh pun perlu segera diwujudkan dengan mengedepankan berbagai dimensi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, mengungkapkan program pembangunan lansia tangguh bahkan sudah masuk dalam musrenbang tematik tahun ini untuk digulirkan tahun depan. "Pembangunan lansia tangguh, dapat ditinjau dari dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, dan lingkungan. Inilah yang penting diperhatikan dalam penyusunan program kegiatan untuk lansia," tandasnya, Minggu (26/3).

Menurutnya lansia adalah bagian dari masyarakat yang juga dikonstruksikan untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Di samping itu ada fakta dan persoalan yang dihadapi lansia, yaitu menurunnya kapasitas fungsional, terutama berhubungan dengan aspek motorik yaitu daya tahan fisik. Untuk itulah tiap program lansia fokus untuk menekan percepatan proses degradasinya. Sehingga dimensi spiritual hingga lingkungan harus dikedepankan.

Oleh karena itu, program pembangunan lansia, imbuh Aman, harus memprioritaskan bagaimana memperkuat daya kesehatan serta meningkatkan aktivitas, dan produktivitas, meskipun dalam proporsi yang tidak terlalu besar. "Setelah nantinya program telah disusun, metode penerapannya harus mampu mengelaborasi dengan pembiasaan agar menjadi gaya hidup, memberikan ruang pembelajaran pada pembaruan, dan pembudayaan untuk membangun ekosistem kolegia," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengatakan penduduk lansia di Kota Yogya adalah bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan. Hal tersebut menjadi usulan program tahun 2024 yang disusun tahun ini. "Berdasarkan data per Juli 2022, dari sekitar 400.000 penduduk di Kota Yogya 14,8 persen itu adalah lansia. Inilah kenapa kita harus saling mendengar dan mengerti apa saja program untuk lansia yang bisa terakomodir di tahun 2024," ujarnya.

Maryustion menjelaskan program kegiatan yang disusun untuk lansia harus mempertimbangkan implementasi secara nyata sesuai dengan kondisi yang ada. Program itu pun tidak perlu rumit namun secara teknis dapat diterapkan dan dirasakan secara langsung bagi lansia di Kota Yogya. "Selain program dari Pemerintah Kota Yogya, para lansia terutama yang kurang mampu juga didukung melalui bantuan sosial, serta diupayakan masuk ke Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kita bersama untuk lansia," urainya. **(Dhi)-f**

Dishub DIY Komitmen Sediakan Transportasi Aman - Nyaman

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan DIY berkomitmen menyediakan transportasi nyaman dan aman. Karena moda transportasi nyaman dan aman adalah tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Menyadari akan hal itu sejumlah upaya terus dilakukan.

"Apapun kendaraannya tujuan terakhirnya adalah keselamatan. Untuk itu sejumlah upaya terus dilakukan guna memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Minggu (26/3).

Dikatakan, masyarakat tidak boleh hanya sekadar bisa mengendarai sepeda motor atau mobil. Tetapi harus memahami, mengerti kendaraan yang dipakai, rambu-rambu, aturan lalu lintas dan undang-undang lalu lintasnya. Dirinya berharap, ada sustainable transportation ke sustainable mobility.

"Dulu, orang berbicara hanya pada objek kendaraan, bagaimana kendaraan bisa cepat berjalan. Sekarang kita harus berbicara untuk sisi kemanusiaannya, sisi hukumnya atau bagaimana masyarakat berlalu lintas dengan mudah murah, aman, nyaman dan selamat," ungkap Made.

Komentar senada diungkapkan oleh pakar transportasi UMY Noor Mahmudah. Menurutnya, apabila menilik perkembangan lalu lintas yang demikian cepat moda transportasi yang aman adalah menggunakan transportasi publik. Adapun untuk penyediaan transportasi yang ramah perempuan, Pemda DIY telah menyediakan hal tersebut melalui kursi prioritas di kendaraan umum untuk perempuan. **(Ria)-f**

SPS AWARDS 2023

Majalah SIBAKUL Pemda DIY Sabet Silver Winner

YOGYA (KR) - Majalah SIBAKUL milik Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, menyabet penghargaan Silver Winner Inhouse Magazine Awards (InMA) untuk Kategori Majalah Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Terbaik. Ini merupakan penghargaan prestisius yang membanggakan Pemda DIY karena mampu bersaing dengan majalah-majalah internal papan atas milik Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah dari seluruh propinsi di Indonesia. Meskipun majalah SIBAKUL baru berusia satu tahun, namun mampu menarik hati para dewan juri yang merupakan para tokoh media di tanah air.

Majalah SIBAKUL hadir atas prakarsa serta pemikiran kreatif Kepala Dinas koperasi dan UKM DIY Ir Srie Nurkyatsiwi MMA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah DIY. Untuk menterjemahkan pemikiran tersebut Dinas Koperasi dan UMKM DIY menggandeng Fauzie Helmy salah satu tokoh industri kreatif ahli Branding dan Visual Merchandising sebagai Pemimpin Redaksi. Kehadiran Majalah SIBAKUL diharapkan menjadi media informasi para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah DIY untuk menjangkau ke wilayah yang lebih luas terutama para buyer baik lokal maupun internasional. Mengingat potensi serta kualitas pelaku usaha DIY sudah bertaraf nasional bahkan internasional.

Sejak pertama kali terbit pada 2022 Majalah SIBAKUL baru menerbitkan 3 edisi. Namun usia yang relatif muda mampu memenangkan ajang yang sangat bergengsi insan pers nasional. Di kategori ini mampu bersanding dengan majalah milik Kementerian PUPR, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan dan media cetak milik pemerintah lain. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan UKM naik kelas.

"Harapannya, dengan penghargaan ini semakin memacu Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk terus mendukung dan mendampingi masyarakat melalui berbagai program SIBAKUL," tutur Srie Nurkyatsiwi.

Selain itu, dengan penghargaan ini akan semakin memacu seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas majalah SIBAKUL baik dari sisi konten informasi maupun kemudahan akses oleh masyarakat.

KR – Istimewa

Penghargaan Silver Winner Inhouse Magazine Awards (InMA) yang diterima oleh Kepala Dinas koperasi dan UKM DIY Ir Srie Nurkyatsiwi MMA

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada sambutan edisi perdana majalah SIBAKUL menyampaikan apresiasinya. Ketika sistem SIBAKUL digaungkan ternyata memberikan imbas yang sedemikian besar bagi keberlangsungan dinamika ekonomi para pelaku UMKM. Terobosan yang dilakukan melalui pengembangan sistem SIBAKUL seharusnya memberi inspirasi bahwasannya semua itu harus ditulis dan ditularkan sebagai buah inspirasi untuk kemajuan masa depan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek perjuangan dari potret pelaku UMKM yang ada di Jogja, diharapkan akan membawa angin segar yang bisa dinikmati secara mendalam melalui tulisan dan gambar.

Ajang SPS Awards 2023 mengusung tema besar "Kolaborasi dan Inovasi untuk Kemandirian Pers Indonesia." Ajang ini merupakan puncak apresiasi bagi para pegiat media. Dari total 542 karya yang dikompetisikan, terlihat media terus melakukan banyak terobosan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, SPS Awards kali ini menghadirkan lima kategori, yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Student Media Awards (ISPRIMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), serta Indonesia Digital Media Awards (IDMA). Penyaringan dan penjurian dilakukan sepanjang kurang lebih tiga bulan oleh panitia dan dewan juri. **(Sal)**